

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Penerbit Prenada Media Group, 2016.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem penegakan Hukum) Di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP BARU (Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana)*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2017.

Afandi, Fachrizal. *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*. Jakarta Timur : Penerbit Penerbit Sinar Grafika, 2025.

Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan*

Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum. Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2015.

Arifin, Ibrahim. *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta : Penerbit BPHN, 2012.

Brenda Gratland, and Judy Osburn. *Asset Forfeiture: What To Do When Police Seize Property*. *Forfeiture Endangers American Rights Foundation*, 2011.

Direktorat Hukum. *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.

Financial Action Task For. "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation". Paris, France : FATF, 2025.

Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok : Penerbit Rajawali Pers, 2019.

Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta : Penerbit UII Press
Yogyakarta, 2014.

Hedar, Harris Arthur et. al. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan Menurut Hukum
Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang Suatu Studi Komparatif*.
Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024.

Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaaan
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019.

Husein Yunus, Zikry Ichsan. *Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Pertama*.
Depok : Penerbit Rajawali Pers, 2025.

Luhut, Pangaribuan. *Tindak Pidana Perekonomian Dalam Perspektif Anti Korupsi
Pengantar, Ketentuan Dan Pernyataan*. Depok : Penerbit Papas Sinar
Sinanti, 2024.

Sholikin, M. Nur, Novriza et. al. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta : Penerbit
Perpustakaan Nasional RI, 2018.

Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang : Penerbit Yayasan Sudarto,
2018.

Suteki, Tufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*.
Depok : Penerbit Rajawali Pers, 2022.

Yanuar, Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang : Penerbit Setara Press, 2021.

Yustiavandana, Ivan et. al. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Instrumen Internasional

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 November 2000 melalui Resolusi 55/25, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 melalui Resolusi 58/4, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Jurnal

Ghani Maeda Yuhandri, “Urgensi Penerapan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura”. *Lex*

Patrimonium Vol. 4 No.1. 2025.

<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/11>.

Khayrunaas Adhyaksa Mulyana et. al., “*Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Pengadilan Terhadap Perampasan Aset Lintas Teritorial Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*”. *Padjadjaran Law Review* Vol. 13 No. 1. 2025.
<https://doi.org/10.24198/plr.v13i1.2211>.

Marfuatul Latifah, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The urgency of assets recovery act in Indonesia)*”. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Vol 6, No. 1. 2015.
<https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/244>.

Manguni Wiria Darma Sinulingga et. al., “*Criminal Law Reform of Asset Confiscation System for Proceeds Corruption and Money Laundering In Indonesia*”. *Veredas do Direito* Vol. 23, No. 8. 2026.
<https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5833>.

Nur Sholikin, “Mencermati Peraturan Pembentukan Mahkamah Agung (PERMA)”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.
https://www.researchgate.net/publication/342029298_MENCERMATI_PERATURAN_PEMBENTUKAN_MAHKAMAH_AGUNG_PERMA.

Rudi Rizki, “*Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya*.”, *Indonesian Journal of International*

Law Vol. 1, No. 4, *Article* 10. 2021.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1355&context=ijil>.

Zydane Maheswara Prasetyo et al., “Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* Vol. 1, No.12. 2025.
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.862>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubahnya
“Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17)
dan Undang-Undang R.I Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

APG, “*About Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing*”.
https://www.apgml.org/about-us/about-anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing?utm_source=chatgpt.com.

Financial Action Task For, “*International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*” (Paris, France : FATF, 2025). <https://www.fatf-gafi.org/>.

Pusdiklat APUPPT, “Mengetahui Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang”, Juni 9, 2024. <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/>.

PPATK, “Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa Jakarta 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026”, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Januari, 29, 2026.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html.

PPATK, “FATF Terbitkan Panduan Komprehensif Pemulihan Aset Global: Dorong Negara Anggota Jadikan *Asset Recovery* Sebagai Prioritas Nasional”, November 2025.
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1558/fatf-terbitkan-panduan-komprehensif-pemulihan-aset-global-dorong-negara-anggota-jadikan-asset-recovery-sebagai-prioritas-nasional.html>.

PPATK, “Implementasi Rekomendasi FATF di Indonesia: Langkah Maju dalam Standar Global APU PPT”, Januari, 08, 2025.
<https://ifii.ppatk.go.id/en/Web/Berita/detil/296/>.

United Nations Office on Drugs and Crime Corruption and Economic Crime Branch, “Learn About UNCAC”,
<https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/learn-about-uncac.html>.